

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan aspek fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan di suatu negara. Pada dasarnya pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu. Upaya perubahan ke arah yang lebih baik itu meliputi berbagai indikator yaitu sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Todaro, 2009). Oleh sebab itu, pembangunan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara.

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi terletak pada tiga komponen utama yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Pertama, yaitu kecukupan (*sustenance*) yang meliputi barang dan layanan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia pada tingkat paling minimum. Kedua, harga diri (*self-esteem*) yaitu berkaitan dengan perasaan berharga yang dinikmati suatu masyarakat jika sistem dan lembaga sosial, politik, dan ekonominya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kehormatan, martabat, integritas, dan kemandirian. Ketiga, kebebasan (*freedom*) yaitu situasi yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya dan setiap orang dapat mengambil pilihan riil sesuai keinginannya.

Selain itu, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan dalam sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional (Arsyad, 1999).

Pembangunan suatu negara atau wilayah pada hakikatnya tidak selalu dikaitkan dengan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang banyak dipaparkan oleh sebagian besar negara-negara maju dan beberapa ekonom, tetapi aspek yang paling penting perlu diperhatikan yaitu pemerataan dan sisi keberlanjutan pembangunan. Mencermati keadaan saat ini bahwasannya pembangunan yang dilakukan selama ini mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan melupakan aspek pemerataan dan distribusi spasial atas sumber daya yang ada.

Ali dan Son (2007) mengemukakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat perlu bagi keberhasilan suatu negara. Namun demikian belum cukup apabila belum diikuti dengan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap

peluang yang tercipta untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Sebagaimana salah satu tujuan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 penduduk miskin di dunia pada umumnya berkurang setengahnya. Namun demikian, fakta yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat 800 juta lebih orang di dunia dengan biaya hidup tidak lebih dari 1.25 dolar per hari (UNDP, 2015). Mengingat pentingnya keberlanjutan dari program MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015 untuk mengurangi kemiskinan di dunia, untuk itu dibentuk program lanjutan dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015, *Millennium Development Goals* (MDGs).

Masalah pembangunan yang berkelanjutan sudah lama menjadi perhatian negara-negara dalam mengembangkan perekonomian khususnya negara di kawasan Asia Tenggara sebagai implementasi untuk mencapai tujuan dari program SDG's. Berbagai upaya kerjasama dilakukan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta stabilitas keamanan yang terjaga seperti hubungan kerja sama yang dilaksanakan oleh negara di sekitar Asia Tenggara, yang dikenal dengan sebutan *Association of South East Asian Nation* (ASEAN). Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang telah dilakukan adalah

ASEAN Economic Community (AEC) atau yang sering dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

AEC pada dasarnya adalah perluasan dari integrasi ekonomi regional yang telah dimulai beberapa tahun silam, tepatnya pada saat pembentukan AFTA tahun 1992. Kerangka besar dari integrasi ekonomi kawasan kemudian dirumuskan pada *ASEAN Summit* tahun 1997 di Kuala Lumpur yang menghasilkan Visi ASEAN 2020, yaitu tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dengan memanfaatkan liberalisasi perdagangan (Afandi, 2011).

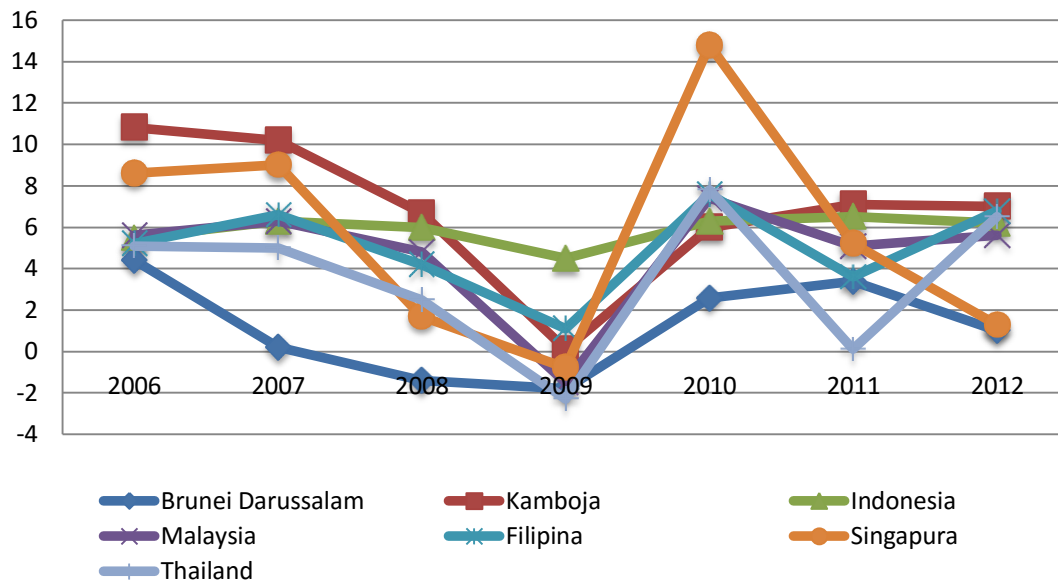
AbduRofiq (2014) mengemukakan bahwa pelaksanaan AEC 2015 tidak lepas dari dampak positif dan negatif. Namun, jika dilihat dari tingkat pendapatan yang belum merata serta kesenjangan dengan negara-negara yang maju di kawasan ASEAN lainnya, AEC 2015 justru akan memberikan peluang yang positif bagi pembangunan domestik maupun pengembangan internasional. Melalui prosedur dan pengembangan profesionalitas yang jelas maka AEC akan mampu merubah tantangan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

International Monetary Fund (IMF) mengemukakan bahwa pada tahun 2012 *emerging market*, seperti negara berkembang di Asia akan terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Dampak krisis menurut Raz (2012) dapat diperkecil selain karena sifat eksternalitas krisis, sebagian besar perekonomian di Asia Timur

telah mengambil pelajaran setelah krisis keuangan Asia Timur 1997 dengan memperkuat fundamental ekonomi dengan didukung kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah yang baik.

Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN (2015), ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Hal ini terkait dengan faktor pendukung seperti perdagangan intra-ASEAN yang meningkat pesat dari 25 persen menjadi 30 persen dengan total pendapatan perkapita mencapai 2,5 Triliun USD dalam kurun waktu 5 tahun setelah AEC diluncurkan. Pertumbuhan ASEAN berdampak pada terjadinya perubahan signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, perluasan akses informal dan edukasi, persiapan menghadapi bencana, serta mempersempit kesenjangan antara negara-negara anggota.

Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di ASIA khususnya ASEAN mencapai angka 6.0 persen dan mencapai angka 6.6 persen pada tahun 2013. Faktor pendukung utama pertumbuhan di Asia didukung oleh tingkat konsumsi yang sangat besar di Asia Tenggara dan adanya pemulihan ekonomi. Dalam setahun terakhir, negara-negara di kawasan Asia justru menunjukkan perkembangan positif di tengah perlambatan ekonomi global. Tingginya tingkat konsumsi disebabkan oleh jumlah populasi negara tersebut hampir setengah dari penduduk dunia, yaitu sekitar 2.8 miliar penduduk atau sekitar 40 persen dari jumlah penduduk dunia (World Bank, 2013).



Sumber : ASEAN, 2013 (data diolah)

GAMBAR 1.1

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN Tahun 2006-2012
(Persen)

Dampak dari krisis ekonomi di Amerika Serikat tahun 2008-2009 menyebabkan penurunan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di ASEAN sebesar 2 persen dari tahun sebelumnya. Sebelum krisis rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 6 persen. Meskipun demikian, dampak dari krisis dapat segera teratasi dengan adanya pemulihan ekonomi yang cepat dari negara ASEAN khususnya negara-negara berkembang. Lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terlihat pada tahun 2010 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi

berada di kisaran 7.8 persen. Di tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi di ASEAN sudah tidak terlalu berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi ASEAN cenderung stabil berada pada angka 5 sampai dengan 6 persen.

Menurut Cheng dan Degryse (2006), pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun non bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian (Booklet Keuangan Inklusif, 2014).

Upaya untuk mengatasi keterbatasan akses layanan jasa keuangan tersebut, maka muncul suatu program perluasan akses layanan keuangan yang disebut dengan keuangan inklusif. Keuangan inklusif mempromosikan akses dan penggunaan layanan keuangan berkualitas tinggi secara global, khususnya di antara orang-orang miskin (Steelyana, 2013).

Beck dkk (2008) mengemukakan bahwa hambatan terhadap akses perbankan dapat disebabkan oleh model bisnis bank itu sendiri, posisi pasar, tingkat kompetisi yang dihadapi, kondisi mikroekonomi, serta perjanjian dan peraturan yang dijalankan. Selain dikarenakan kondisi pasar sektor perbankan, hambatan terhadap akses perbankan juga dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan perbankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah.

Sektor keuangan merupakan inti dari proses pembangunan (Kunt dkk, 2008). Pentingnya keuangan inklusif yang berdasarkan atas prinsip pemerataan dan pertumbuhan harus menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan, untuk itu keuangan inklusif sangat dibutuhkan dalam proses pengentasan kemiskinan (Sanjaya, 2014).

Keuangan inklusif merupakan salah satu cara penting untuk mengetahui distribusi layanan sektor perbankan. Inklusi keuangan berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan jasa keuangan (Sarma, 2012). Saat ini, keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti G20, APEC, AFI, OECD dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Hal ini disebabkan karena keuangan inklusif merupakan salah satu strategi besar dalam pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.

Keuangan inklusif telah tumbuh menjadi kunci utama dalam pilar AEC yang dimulai pada tahun 2015 (Financial Inclusion Conference, 2014). Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif suatu negara dapat disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur (Sarma dan Pais, 2011). Beberapa faktor pada keadaan sosial ekonomi antara lain jumlah angka melek huruf, pendapatan per kapita, populasi desa dan pengangguran. Sementara itu, yang termasuk dalam kategori infrastruktur dapat berupa jumlah jaringan jalan aspal, jumlah pengguna internet, jumlah pengguna telepon dan lain sebagainya. Angka melek huruf memiliki pengaruh terhadap keinklusan keuangan kaitannya dengan kemampuan dasar individu untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga individu tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Edukasi keuangan akan meningkatkan keuangan inklusif (Migap dkk, 2015).

Dengan demikian melek huruf akan mendukung program keuangan inklusif yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Sementara itu, faktor lainnya yang berpengaruh pada keuangan inklusif adalah jalan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor perhubungan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan distribusi barang dan jasa serta kelancaran investasi. Dengan demikian, semakin baik kondisi jalan di suatu negara akan memudahkan akses ke lembaga keuangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis keuangan inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC. ASEAN yang akan penulis teliti ini terdiri dari negara anggota seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, ketiga negara anggota ASEAN lainnya seperti Laos, Myanmar dan Vietnam tidak masuk dalam penelitian dikarenakan data-data yang sulit untuk peneliti peroleh. Selain itu, faktor-faktor terkait yang akan diteliti dalam mempengaruhi keuangan inklusif di ASEAN di antaranya adalah faktor sosial ekonomi yang diproksikan dengan IPM dan jumlah populasi desa serta dari faktor infrastruktur akan diproksikan dengan jumlah jaringan jalan aspal.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data yang digunakan untuk menganalisis keuangan inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC yaitu berdasarkan hasil perhitungan dari dimensi penetrasi, ketersediaan dan penggunaan jasa perbankan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya indeks keuangan inklusif sangatlah beragam. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada faktor indeks pembangunan manusia (IPM), penduduk desa dan jalan aspal dengan tahun perhitungan 2010-2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tingkat Keuangan Inklusif di ASEAN?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC?
3. Bagaimana pengaruh Penduduk Desa terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC?
4. Bagaimana pengaruh Infrastruktur terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan indeks keuangan inklusif di negara ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC. Namun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu :

1. Mengetahui tingkat Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC.
2. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi kebijakan dalam AEC.
3. Mengetahui pengaruh Penduduk Desa terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC.
4. Mengetahui pengaruh Infrastruktur terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan keuangan inklusif dan memberikan gambaran terkait keuangan inklusif di ASEAN sebagai strategi dalam kebijakan AEC.

2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tinjauan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan, pemerataan distribusi pendapatan maupun peluang atau kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan sebagai implikasi dari keuangan inklusif.
3. Manfaat bagi penulis ialah dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan memperoleh kesempatan untuk lebih mendalami dan memperluas pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusifitas keuangan di suatu negara.